

**PENGEMBANGAN POTENSI DESA MADE, KECAMATAN KUDU,
KABUPATEN JOMBANG, DALAM MENINGKATKAN
KEMANDIRIAN MASYARAKAT**

**THE VILLAGE POTENTIAL DEVELOPMENT IN THE MADE
VILLAGE, JOMBANG, IN IMPROVING THE WELFARE AND
INDEPENDENCE OF THE COMMUNITY**

Novy Setia Yunas, Mi'rojul Huda
Universitas Brawijaya Malang
Jalan Veteran, Malang, Jawa Timur 65145
novysetiayunas@gmail.com; mirojulhuda@gmail.com

ABSTRACT

The ability and freedom without opportunities would make people in the countryside remain poor. The aim of this community service was to provide facilitation and direction to make a community or a group become empowered, independent, and prosperous. This empowerment program used lecturing and training/workshop approach, as well as mentoring and mentoring by providing experience and direct assignments to groups of gadung crisps craftsmen, PKK and dasawisma. The results of this community service showed that the potential possessed by the Made Village community is quite large. Unfortunately some government policies were considered not right on target, and the lack of access and information made the skills of the community unable to develop optimally. The results of this program which took the form of a smart home program in the field of education, the branding of Srikandi Made in the field of women's empowerment and the environment, as well as the marketing management knowledge of chipmakers in the field of microeconomics, are considered to be able to become a model for the development of villages that can give a new nuance in developing the village potential and the most important economic, social and educational impact on the community in Made Village.

Keywords: assisted village; community empowerment; potential village

ABSTRAK

Adanya kemampuan dan kebebasan tanpa adanya kesempatan akan menjadikan seseorang di perdesaan menjadi miskin secara tidak langsung. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberi fasilitasi dan pengarahan terhadap kemampuan serta kapasitas dalam rangka menjadikan masyarakat atau suatu kelompok menjadi berdaya, mandiri, dan sejahtera. Program pemberdayaan ini menggunakan pendekatan ceramah dan pelatihan, serta pembimbingan dan pendampingan dengan memberikan pengalaman dan penugasan langsung kepada kelompok rumah tangga pengrajin keripik gadung, ibu-ibu PKK, dan dasawisma. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Made sangatlah besar. Sayangnya, beberapa kebijakan pemerintah dinilai kurang tepat sasaran. Selain itu, minimnya akses serta informasi menjadikan keterampilan yang dimiliki masyarakat kurang berkembang dengan baik. Program pengabdian ini berupa program rumah pintar di bidang pendidikan, *branding* Srikandi Made di bidang pemberdayaan perempuan dan lingkungan hidup, serta pengetahuan manajemen pemasaran keripik gadung di bidang ekonomi mikro. Program ini dinilai mampu menjadi sebuah model pengembangan desa binaan yang dapat memberikan nuansa baru bagi pengembangan potensi desa. Hasil terpentingnya adalah program ini memberikan dampak ekonomi, sosial, dan pendidikan bagi masyarakat di Desa Made.

Kata kunci : desa binaan; pemberdayaan masyarakat; potensi desa

PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara maju mengalami persoalan kemiskinan meskipun tidak sebesar negara berkembang. Persoalannya sama, tetapi dimensinya berbeda. Persoalan kemiskinan di negara maju hanya menjadi bagian terkecil dalam komponen masyarakat mereka, tetapi bagi negara berkembang, persoalan tersebut lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin biasanya hampir mencapai setengah dari jumlah penduduk. Bahkan, ada negara-negara sangat miskin mempunyai jumlah penduduk miskin melebihi dua pertiga dari penduduknya.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia memang tidak dapat terlepas dari persoalan kemiskinan. Di Indonesia, jumlah penduduk miskin selama periode 1976--1996 telah mengalami penurunan secara drastis. Sebagai ilustrasi, periode 1976--1981 penduduk miskin turun dari 54,2 juta jiwa (40,1%) menjadi 40,6 juta jiwa (26,9%); tahun 1990 turun lagi menjadi 27,2 juta jiwa (15,1%); tahun 1996, jumlah penduduk miskin tinggal 22,5 juta jiwa (11,2%). Sebelum masa krisis pada tahun 1997, Indonesia sebagai salah satu model pembangunan yang diakui karena berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS tahun 2010, dalam kurun waktu 1976--1996 jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun dari 54,2 juta jiwa atau sekitar 40% dari total penduduk menjadi 22,5 juta jiwa atau sekitar 11%. Keberhasilan menurunkan tingkat kemiskinan tersebut adalah hasil dari pembangunan yang menyeluruh yang mencakup bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, termasuk keluarga berencana (KB), serta prasarana pendukungnya (BPS, 2010).

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia saat ini sudah mencapai 10,96 persen (27,73 juta jiwa) dengan persentase 62,65 persen penduduk miskin berada di desa (BPS, 2015). Melihat perkembangan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Indonesia, pemerintah sadar bahwa persoalan kemiskinan harus menjadi fokus utama karena persoalan ini jika gagal diselesaikan oleh pemerintah akan menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah masyarakat (Bappenas, 2004). Dengan kesadaran yang cukup tinggi dari pemerintah akan usaha pengurangan kemiskinan di Indonesia, pemerintah membuat berbagai macam kebijakan dan strategi untuk mengatasi kemiskinan melalui pembangunan yang merata, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Selama ini, memang kemiskinan lebih berfokus di perdesaan, tetapi tidak menutup kemungkinan di perkotaan angka kemiskinan juga cukup tinggi. Oleh karena itu, saat ini pemerintah tengah menggalakkan banyak program dan mengucurkan banyak dana pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi angin segar bagi pembangunan dan pengentasan kemiskinan di perdesaan.

Salah satu daerah di Kabupaten Jombang yang masih mengalami kendala dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Desa Made terletak di utara Sungai Brantas. Desa Made merupakan salah satu desa yang aksesnya sangat jauh dari pusat kota Jombang, tetapi dekat dengan pusat kota Mojokerto. Sebagian besar penduduknya adalah petani dan masih dalam taraf ekonomi yang memprihatinkan. Secara administratif, Desa Made terdiri atas empat dusun, yaitu Dusun Tawang, Dusun Waru, Dusun Ngembak, dan

Dusun Made. Akses antardusun atau antardesa di Desa Made yang cukup sulit memberikan dampak tersendiri bagi berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Misalnya, dalam bidang pendidikan, untuk mencari pendidikan informal atau bimbingan belajar, peserta didik harus menempuh jarak antara 7--10 kilometer dengan akses infrastruktur jalan yang tidak mudah. Selain itu, biaya yang tidak murah menyebabkan keengganan orangtua untuk memberikan fasilitas pendidikan tambahan bagi anaknya mengingat kondisi ekonomi mereka yang juga memprihatinkan. Adapun kondisi masyarakat Desa Made, Kecamatan Kudu, diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Kondisi masyarakat Desa Made, Kecamatan Kudu	
Komponen	Jumlah
Jumlah Penduduk	1974 jiwa
Jumlah Penduduk Prasejahtera	394 jiwa
Jumlah Penduduk Sejahtera 1	287 jiwa
Jumlah Penduduk Sejahtera 2	77 jiwa
Jumlah Penduduk Sejahtera 3	28 jiwa
Pendidikan Prasekolah Play Group/TK/RA	146 jiwa
Pendidikan Dasar tingkat SD/SMP/MTS	547 jiwa
Pendidikan Lanjutan Tingkat SLTA	112 jiwa
Pendidikan Perguruan Tinggi	15 jiwa
<i>Droup out</i>	45 jiwa

Sumber: Pemerintah Desa Made, Kecamatan Kudu (2017)

Dari segi ekonomi, berdasarkan data Pemerintah Desa Made, diketahui bahwa kondisi perekonomian di Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, pada tahun 2017, didominasi sektor pertanian sebesar 80%. Berdasarkan data desa jumlah buruh tani sebanyak 368 jiwa dan petani 483 jiwa. Sementara itu, lainnya bekerja di sektor perdagangan, wiraswasta, PNS/ABRI/POLRI, dan pensiunan sebesar 20% (Desa Made, 2017).

Selain persoalan yang ada di Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, banyak pula potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan. Seperti potensi di sektor ekonomi, terdapat banyak pemberdayaan usaha ekonomi kecil anyaman pandan. Anyaman pandan di Desa Made ini merupakan usaha turun-temurun yang masih dijaga sampai saat ini oleh para generasi penerus. Potensi tanaman pandan yang sangat besar menjadikan usaha ini tetap lestari hingga saat ini bahkan telah didistribusikan ke luar kota. Namun, persoalannya adalah usaha anyaman pandan ini tidak digarap dengan serius, dalam arti masyarakat hanya membuat anyaman pandan sekadarnya tanpa ada inovasi dan minimnya pengetahuan dalam pemasaran. Selain anyaman pandan, ada pula usaha pembuatan keripik gadung. Tanaman gadung, yang selama ini menjadi tanaman liar yang tumbuh di hutan dan ladang serta beracun jika tidak dapat mengolahnya dengan baik, berhasil diolah menjadi kudapan dan camilan sehat yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Usaha keripik gadung di Desa Made ini pun menjanjikan bagi masyarakat. Pasalnya, keripik gadung ini pun telah didistribusikan ke luar kota. Namun, persoalannya tidak ada standar harga yang menjadikan masyarakat dapat memperoleh profit secara maksimal dari usaha tersebut.

Tidak hanya usaha anyaman pandan dan keripik gadung, di Desa Made terdapat pula pemberdayaan perempuan dalam pembuatan *handmade* dari limbah daur ulang. Usaha pemberdayaan itu cukup menarik karena dikerjakan oleh perempuan dengan jumlah yang cukup banyak. Kebetulan, perempuan adalah mayoritas penduduk di Dusun Waru, Desa Made, Kecamatan Kudu. Mereka memiliki keahlian dalam membuat produk-produk kerajinan berbahan dasar plastik limbah gelas air mineral. Namun, lagi-

lagi persoalan yang ada adalah kurangnya inovasi dan minimnya pengetahuan dalam pemasaran sehingga usaha ini kurang berkembang dan kurang memberi manfaat lebih pada masyarakat, padahal jika mampu dikelola dengan baik, usaha-usaha pemberdayaan ini akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat ataupun kelestarian lingkungan hidup.

Kurangnya pengetahuan dan inovasi masyarakat di Desa Made tentunya dapat diatasi dengan melakukan analisis masalah dan analisis kebutuhan. Akan tetapi, hal tersebut perlu dipahami secara menyeluruh oleh para *stakeholder* yang ada di desa. Pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai sebuah kesejahteraan adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Hal itulah yang mendasari munculnya undang-undang desa. Adanya asas rekognisi dan asas subsidiaritas yang dimiliki desa memungkinkan desa memiliki kewenangan dan pendanaan yang memadai untuk melakukan perencanaan berbasis pemberdayaan. Perencanaan pembangunan yang partisipatif adalah suatu model pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam mewujudkan kesejahteraannya (Syafrizal, 2014).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan sebuah pembangunan desa yang partisipatif, yang berarti penyusunan perencanaan pembangunan dimaknai sebagai proses pelibatan masyarakat secara langsung, dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan. Sementara itu, dalam Pasal 78 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal itu sejalan dengan tujuan pengabdian ini, yaitu memberi fasilitasi dan pengarahan terhadap kemampuan dan kapasitas dalam rangka menjadikan masyarakat atau suatu kelompok menjadi berdaya dan mandiri.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama enam bulan (Februari sampai dengan Agustus 2017). Pendekatan yang dipilih adalah ceramah dan pelatihan, serta pembimbingan dan pendampingan dengan memberikan pengalaman dan penugasan langsung kepada khalayak sasaran, seperti kelompok rumah tangga pengrajin keripik gadung, ibu-ibu PKK, dan dasawisma. Pelaksanaannya sebagai berikut.

1. Ceramah dipilih untuk menjelaskan dan membekali peserta agar memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang teknis penerapan dan rencana pengembangan potensi desa.
2. Setelah ceramah, diberikan pelatihan mengenai segala hal berkaitan dengan potensi desa yang ada. Pelatihan dilakukan untuk keterampilan praktik pengembangan usaha yang berasal dari potensi desa tersebut, misalnya praktik produk gadung dan kemasan yang diversifikasi.
3. Mitra juga didampingi dalam penerapan dan penyusunan pengembangan kegiatan yang memenuhi standar yang dianjurkan.

HASIL DAN DISKUSI

Pendampingan dan penerapan model pembinaan desa ini bekerja sama dengan perangkat Desa Made untuk memberdayakan beberapa potensi dan aset unggulan desa. Model yang diterapkan bukanlah model final, melainkan model awal yang akan terus dipantau dan dikembangkan untuk membentuk model desa binaan yang ideal. Model uji coba yang diterapkan di Desa Made ini diharapkan dapat direplikasi dan dimodifikasi

sesuai dengan kebutuhan desa-desa lain karakteristik masing-masing. Berikut ini model pemberdayaan yang diinisiasi dan luaran program, yang meliputi rumah belajar, srikandi made, dan pemasaran kripik gadung. Selain itu, bentuk kolaborasi Tim dan pemerintah desa juga dibicarakan.

Rumah Belajar: Pemberdayaan Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara. Pendidikan merupakan modal utama bagi seseorang terlebih bagi pembangunan sebuah peradaban. Tanpa pendidikan seseorang atau bahkan sebuah peradaban tidak dapat berkembang secara baik, dinamis, dan bermutu. Di Indonesia, pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah meskipun masih banyak hal yang harus dibenahi agar pembangunan pendidikan di Indonesia semakin berkualitas dan mampu menciptakan sumber daya manusia yang andal serta berdaya saing di era globalisasi saat ini. Namun, dalam realitanya saat ini, peningkatan kapasitas pendidikan seseorang terkadang terkendala biaya serta keterbatasan ekonomi mereka. Realita yang ada saat ini, khususnya di perdesaan, banyak anak bangsa yang memiliki kemampuan serta kualitas yang mumpuni, tetapi tidak mampu untuk mengembangkan kemampuannya hanya karena terkendala masalah ekonomi.

Sebagai salah satu daerah di Kabupaten Jombang yang masih mengalami kendala dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan belajar ialah Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Secara administratif, Desa Made terdiri atas empat dusun, yaitu Dusun Tawang, Dusun Waru, Dusun Ngembak, dan Dusun Made. Akses antardusun atau antardesa di Desa Made yang cukup sulit memberikan dampak tersendiri bagi pendidikan. Untuk mencari pendidikan informal atau bimbingan belajar, peserta didik harus menempuh jarak 7--10 kilometer dengan akses infrastruktur jalan yang tidak mudah. Selain itu, biaya yang tidak murah menyebabkan keengganan orangtua untuk memberikan fasilitas pendidikan tambahan bagi anaknya mengingat kondisi ekonomi mereka juga memprihatinkan.

Beranjak dari persoalan tersebut, muncul gagasan Rumah Belajar dalam rencana pengabdian kepada masyarakat ini. Selanjutnya, dalam perkembangannya, gagasan Rumah Belajar didukung oleh Pemerintah Desa Made melalui bantuan penyediaan berbagai fasilitas, dari tempat belajar, papan tulis, hingga meja. Gagasan Rumah Belajar diharapkan menjadi pos pemberdayaan dalam bidang pendidikan yang muncul dari rasa keprihatinan melihat kondisi anak-anak setingkat sekolah dasar dan madrasah ibtida'iyah di Desa Made. Mereka memiliki semangat belajar cukup tinggi, tetapi tidak disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Rumah Belajar didefinisikan sebagai sebuah sarana yang dibutuhkan oleh peserta didik di Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, untuk melakukan kegiatan belajar pascakegiatan pendidikan formal di sekolah. Rancangan ini pun bukan tanpa alasan. Tujuan utama Rumah Belajar ialah mengembangkan media pembelajaran pendidikan informal yang memadukan ilmu pengetahuan dan agama bagi peserta didik tingkat sekolah dasar. Pada era sekarang sangat sulit menemukan lembaga pendidikan informal yang memadukan ilmu pengetahuan dan nilai agama, padahal dua aspek tersebut sangat penting bagi perkembangan pendidikan anak. Ilmu pengetahuan penting dan nilai agama pun lebih penting sebagai dasar atau fondasi mental. Apalagi di tengah arus globalisasi yang cukup pesat sehingga berbagai pengaruh dari luar yang cenderung negatif sedikit banyak memengaruhi pola pikir dan perilaku anak. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan nilai agama harus diberikan secara proporsional sebagai modal serta benteng mental bagi anak.

Dalam pelaksanaannya, Rumah Belajar diasuh oleh 5--10 mahasiswa yang menekuni bidang pelajaran masing-masing. Di sisi lain, untuk proses kaderisasi pengajar di Rumah Belajar tersebut, pemerintah desa merekrut masyarakat sekitar yang masih kuliah atau pascakuliah. Hal itu juga dimaksudkan pemerintah desa untuk memberikan keterampilan tambahan bagi masyarakat yang kelak akan menjadi pendidik.



Gambar 1. Pelaksanaan Rumah Belajar di Desa Made

Dengan berdiri Rumah Belajar, arah pengembangannya tentunya agar anak-anak Desa Made memiliki semangat dalam mencari ilmu dan meningkatkan kemampuan serta kualitas mereka. Anak-anak seusia mereka masih dalam usia emas. Mereka membutuhkan asupan pengetahuan dan nilai agama yang mencukupi sehingga bisa menyentuh tingkat intelegensi tertinggi mereka. Dengan hasrat dan semangat belajar yang tinggi disertai dengan sarana serta prasarana belajar yang memadai, diharapkan anak-anak tersebut dapat mencapai potensi terbaiknya.

Pada awal berdiri, Rumah Belajar hanya diikuti oleh sekitar sepuluh siswa SD kelas VI. Namun, dalam perkembangannya pada bulan kedua pelaksanaan pengabdian ini, jumlah peserta mencapai tiga puluh siswa dari SD hingga SMP. Keberhasilan Rumah Belajar dalam meningkatkan prestasi belajar siswa juga terlihat dari dukungan dan informasi yang diberikan oleh orangtua dan guru di sekolah siswa masing-masing.

Srikandi Made: Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Lingkungan

Kondisi dan posisi perempuan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain di bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Realita tersebut menunjukkan bahwa kaum perempuan saat ini dinilai masih menjadi kaum yang termarginalkan sehingga persoalan pemberdayaan perempuan memiliki bidang garapan yang luas. Salah satu yang menarik untuk dibahas adalah pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Keberdayaan perempuan di bidang ekonomi adalah salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan. Saat perempuan menjadi kaum terdidik, mempunyai hak-hak kepemilikan, memiliki kebebasan untuk bekerja di luar rumah serta mempunyai pendapatan mandiri menandakan kesejahteraan rumah tangga meningkat.

Di Desa Made, Kecamatan Kudu, berdasarkan data pemerintah desa, secara kuantitas jumlah kaum perempuan cukup besar. Hal itu tentunya menjadi potensi yang menarik untuk dikembangkan, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi perempuan.

Energi yang sangat besar dari kaum perempuan dapat disalurkan dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi, terkadang kenyataan yang ada tidak sebagus angan-angan dan khayalan yang ada. Energi yang sangat besar tersebut kadang-kadang hanya akan habis untuk hal-hal yang tidak berguna.

Namun, di Dusun Waru, Desa Made, ada potensi besar yang dapat dikembangkan kaum perempuan, khususnya dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Ada kelompok perempuan yang memiliki keterampilan dalam hal membuat kerajinan tangan (*handycraft*) dari limbah gelas plastik air mineral. Berawal dari menyalurkan kemampuan dan mengisi waktu senggang, kelompok yang diberi nama Srikandi Made ini mampu membuat berbagai kerajinan tangan, seperti tas, topi, dompet, dan tempat minum dari limbah gelas plastik air mineral yang kemudian memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Hal tersebut merupakan potensi bagi pengembangan ekonomi perempuan. Sayangnya, pemberdayaan ekonomi tersebut belum tersentuh berbagai macam bantuan dan pendampingan yang baik dari pemerintah.

Kegiatan membuat kerajinan tangan yang dilakukan oleh kelompok perempuan yang memanfaatkan limbah plastik ini menjadikan sebuah kegiatan positif dalam konsep *sustainable development*. Adanya kelompok perempuan yang berpartisipasi dalam daur ulang sampah, yang gagasannya muncul dari seorang perempuan yang bernama Sarmini, perempuan yang lain dapat digerakkan untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis. Gagasan Sarmini tersebut didukung oleh sepuluh perempuan yang tergabung dalam Dasawisma dan memiliki peran masing-masing, dari mengumpulkan bahan bekas, membersihkan bahan bekas yang telah terkumpul, menjahit, hingga melakukan *packing*. Setelah proses selesai dan *packing*, pelaksana pengabdian ini memberikan pendampingan terhadap pemasarannya. Jadi, produk Srikandi Made saat ini telah didistribusikan melalui Gerai Dekranasda Kabupaten Jombang dan telah diikuti dalam berbagai pameran potensi Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur.

Usaha Keripik Gadung: Berdayakan Tanaman Liar Menjadi Sumber Pendapatan

Salah satu potensi Desa Made adalah memiliki umbi-umbian cukup besar, di antaranya umbi gadung (30 ton/tahun), ganyong (15 ton/tahun), dan garut (20 ton/tahun). Dibandingkan umbi-umbian lainnya, gadung dinilai sebagai tanaman liar yang beracun dan sangat sulit dalam pengelolaannya, padahal gadung merupakan salah satu sumber alternatif karbohidrat yang dapat dijadikan peningkatan diversifikasi pangan dengan mendayagunakan pangan lokal. Kandungan karbohidrat pada gadung sekitar 29,7 gram dalam setiap 100 gram gadung segar. Kandungan gizi umbi gadung terdiri atas karbohidrat, protein, serta unsur mineral kalsium, fosfor, besi, vitamin A, B, dan C. Gadung memang mengandung zat beracun, yaitu asam sianida atau yang sering dikenal dengan HCN. Namun, hal itu dapat diatasi dengan cara pengolahan yang tepat sehingga kadar sianidanya dapat diturunkan hingga ambang batas yang aman untuk dikonsumsi.

Di Desa Made, gadung dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomis bagi masyarakat. Jika dijual dalam bentuk umbi segar, harganya relatif murah, sedangkan pengolahan produknya hanya direbus atau digoreng. Bahkan, jika panen berlimpah, karena tidak mempunyai nilai jual yang tinggi, hasil panen umbi-umbian akan dibiarkan di lahan. Setidaknya, terdapat dua puluh unit usaha pemberdayaan keripik gadung di Desa Made yang setiap produksinya mampu menghasilkan kurang lebih tiga puluh kuintal keripik gadung yang siap dipasarkan ke berbagai kota. Usaha pemberdayaan keripik gadung tersebut membuktikan bahwa umbi-

umbian yang selama ini dipandang sebagai tanaman liar dan beracun oleh sebagian masyarakat mampu diolah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2. Produk keripik gadung made

Berbeda dengan pemberdayaan yang lain, usaha keripik gadung di Desa Made ini telah memperoleh perhatian dari pemerintah, misalnya kelompok pemberdayaan keripik gadung tersebut memperoleh bantuan mesin pemotong gadung dan mesin spinner peniris minyak dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jombang. Sayangnya bantuan tersebut tidak dimanfaatkan oleh masyarakat kelompok pemberdayaan usaha keripik gadung karena spesifikasinya tidak sesuai dengan apa yang biasanya digunakan oleh masyarakat.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terhadap usaha keripik gadung ini dilakukan pada dua puluh unit usaha yang ada di Desa Made yang dikoordinasi Ibu Ulil. Awalnya cukup berat untuk menyatukan *frame* unit usaha yang ada karena masing-masing memiliki standar pembuatan, harga, dan relasi penjual yang berbeda. Namun, setelah dilakukan pendampingan dan dimusyawarahkan oleh Kepala Desa, akhirnya kedua puluh unit usaha tersebut berkenan melakukan proses usaha dengan standar yang sama. Standar dasar yang diberikan mulai dari ukuran keripik hingga proses *packing* yang sama satu di antara unit usaha yang lain. Setelah dilaksanakan pengabdian ini, produk keripik gadung tersebut telah didistribusikan ke beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Mojokerto, Malang, Batu, Banyuwangi, hingga ke Bali dan lebih memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena telah memiliki label (*brand*) dibandingkan sebelumnya yang hanya dijual dalam *pack* yang besar.

Kolaborasi Tim dan Pemerintah Desa

Keberadaan Tim di di Desa Made memang tidak terlepas dari keterbukaan perangkat desa dalam memberikan akses informasi dan perizinan dalam menerapkan beberapa model program desa binaan. Tiga model program desa binaan yang disampaikan saat ini sudah diterapkan di Desa Made dan sudah mulai tampak outputnya. Ada beberapa program dan rencana program yang akan didiskusikan dan dimatangkan dengan kepala desa beserta jajarannya, serta beberapa tokoh masyarakat dan kelompok perempuan.

Kegiatan dilakukan sebatas memfasilitasi dan mengarahkan apa yang sudah mereka miliki, baik dari segi aset maupun keterampilan. Masyarakat Desa Made adalah masyarakat yang ulet, pekerja keras, dan mempunyai cara pandang sendiri dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi. Hanya ada beberapa fasilitas dan kesempatan yang dapat mereka manfaatkan dan kembangkan. Hal itulah yang ditampilkan dan didiskusikan dengan *stakeholder* yang ada demi kesejahteraan Desa Made.

Mengutip beberapa pendapat dari pakar desa dan bagaimana desa seharusnya membangun dan memberdayakan masyarakat, hal itu dapat dilihat dari sisi makna pembangunan desa; dalam konteks ini desa membangun berbeda dengan membangun desa (Eko, 2014). Meskipun membangun desa bermakna pembangunan perdesaan (antardesa) yang berada di luar domain desa, praktik selama ini adalah negara membangun desa, yang ditempuh dengan cara intervensi dan imposisi negara ke dalam desa, yang justru melemahkan eksistensi desa. Membangun desa bermakna negara hadir di depan sebagai aktor utama yang membangun desa, sedangkan desa membangun berarti pembangunan desa yang dimulai dari belakang. Negara seharusnya berdiri di belakang desa untuk memberikan dorongan dan *support*. Selama desa belum mampu untuk membangun dirinya sendiri, dan pemerintah masih melakukan intervensi yang besar terhadap pembangunan di desa, selama itu pula desa tidak akan pernah bisa mandiri. Pembangunan harus mulai diarahkan untuk menuju sebuah kemandirian. Dengan demikian, desa membangun berarti desa yang mempunyai kemandirian dalam membangun dirinya (*self development*) (Eko, 2014).

Kegagalan paradigma pembangunan di Indonesia dan di beberapa negara acapkali terjadi karena perencanaannya yang teknokratis dan tidak mendorong partisipasi masyarakat (Cernea, 1988). Namun, realitasnya, keberadaan masyarakat Desa Made yang sangat partisipatif dan mampu berinovasi dengan beberapa hasil kerajinan dan hasil olahan makanan haruslah didorong dan difasilitasi tanpa harus melakukan intervensi secara berlebihan. Intervensi dan upaya bantuan yang tidak melihat kondisi masyarakat terbukti tidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Sebagai contoh, pemberian alat pengering minyak dan alat pemotong tidak dapat dimanfaatkan oleh pengrajin gadung.

Tim menilai bahwa belum banyak upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat Desa Made dalam mengembangkan beberapa potensi yang dimiliki di atas. Beberapa kendala administrasi dan rumitnya nomenklatur dana desa, serta tidak adanya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) mungkin menjadi beberapa penyebab mengapa beberapa potensi, yang seharusnya menjadi produk unggulan desa, belum terkelola dengan baik. Meskipun belum ada hasilnya, upaya untuk mendorong desa agar memberikan respon yang lebih terhadap potensi yang dimiliki oleh Desa Made terus dilakukan. Adanya bantuan permodalan bagi usaha yang sudah dimiliki masyarakat tentu akan menjadikan geliat usaha masyarakat dan kelompok akan semakin hidup. Setidaknya, ketika ketua kelompok perempuan dan pengusaha kripik gadung diwawancarai, belum ada bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah desa kepada mereka. Begitu juga dengan keberadaan Bumdes yang mendesak untuk didirikan mengingat hasil olahan dan kerajinan membutuhkan wadah untuk distribusi barang, di samping untuk pemasukan kas desa dari keuntungan Bumdes. Pendekatan kepada masyarakat dan perangkat desa harus dilakukan secara berimbang karena pemberdayaan tidak akan berhasil apabila semua *stakeholder* tidak memiliki kesamaan pemahaman dan tidak memiliki niat memajukan desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Upaya dan prakarsa untuk memajukan desa dan memberdayakan masyarakat desa harus menjadi prioritas utama. Semangat undang-undang desa menjadi angin segar bagi desa yang selama ini selalu dianaktirikan dalam hal pembangunan. Pemberdayaan dapat dilakukan apabila semua pihak sadar akan pentingnya arti kemandirian dan kesejahteraan. Keberadaan Desa Made yang jauh dari perkotaan dan susah akses serta infrastruktur tidak membuat masyarakat terbelakang dan minder menghadapi kerasnya kehidupan. Kelompok perempuan dengan energi besar yang mereka miliki mampu mengelaborasi antara kecintaan terhadap lingkungan dan keuntungan ekonomi, dengan memanfaatkan limbah plastik menjadi kerajinan tangan yang indah. Para pengusaha keripik gadung yang mampu melihat peluang bisnis dari umbi liar serta para pengrajin tikar dari daun pandan menjadi bukti bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang cerdas dan ulet.

Dari simpulan tersebut, saran yang disampaikan adalah program tersebut dapat berkelanjutan. Keberadaan pemerintah pusat sampai pemerintahan paling bawah, yaitu desa, para peneliti dan akademisi, serta LSM atau NGO diharapkan mendorong serta memfasilitasi potensi dan kemampuan yang sudah dipunyai oleh masyarakat desa. Kebutuhan akan akses serta informasi menjadi kendala bagi masyarakat desa untuk maju dan berkembang. Adanya beberapa inisiasi model desa binaan berupa kegiatan, seperti Rumah Belajar, Srikandi Made, serta pemasaran kripik gadung, adalah upaya untuk berbagi informasi dan pengetahuan dengan masyarakat. Upaya tersebut perlu terus dilakukan agar terbentuk desa yang sejahtera dan mandiri demi mencapai kemajuan bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada masyarakat Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, beserta seluruh perangkat Desa Made, Ibu Kepala Desa, Winarsih, dan Ibu Ulil selaku Koordinator Usaha Gadung Srikandi Made yang telah bekerja sama untuk mencapai tujuan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Bappenas. (2004). *The economics of democracy: Financing*. Jakarta: Bappenas.
- Cernea, M.M. (1988). *Mengutamakan manusia di dalam pembangunan: Variabel-variabel sosiologi di dalam pembangunan pedesaan*. Jakarta: UI Press.
- Eko, S. (2014). *Desa membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Syafrizal. 2014. *Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.